



Policy Brief No. 1 Tahun 2026

Penambahan Chatra pada Borobudur: Risiko Rekonstruksi Spekulatif dan Implikasi Kebijakan Konservasi

FOKUS KAJIAN

Wacana penambahan chatra pada stupa induk Candi Borobudur telah berkembang dari isu teknis arsitektur menjadi perdebatan multidisipliner yang melibatkan arkeologi, kebijakan publik, agama, dan pariwisata. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tidak terdapat konsensus ilmiah mengenai keberadaan chatra sebagai bagian asli dari struktur Borobudur.

Diskursus akademik memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan arkeologis berbasis bukti dan pendekatan simbolik yang berkembang dalam ruang publik (FIB UGM 2024). Di sisi lain, kajian kebijakan menunjukkan adanya ambiguitas dalam perumusan kebijakan, terutama antara kebutuhan religius dan keterbatasan bukti historis serta risiko konservasi (Badruzzaman 2023).

Dalam konteks ini, penambahan chatra berpotensi dikategorikan sebagai rekonstruksi spekulatif yang bertentangan dengan prinsip konservasi internasional, berisiko terhadap keaslian monumen, serta berpotensi menciptakan preseden kebijakan yang problematik.

TEMUAN UTAMA

- ▶ Tidak terdapat bukti struktural yang mendukung keberadaan chatra pada stupa induk Borobudur maupun stupa astapada, jala, dan polos di sekelilingnya.
- ▶ Ikonografi relief Borobudur menunjukkan representasi stupa tanpa chatra (11 Panil) lebih dominan daripada yang berchatra. Bahkan stupa pada kutagara Buddha (13 Panil) seluruhnya tidak berchatra. Stupa berchatra (9 Panil) hanya tampak pada relief yang menggambarkan stupa persembahan dan penyimpanan relik.
- ▶ Rekonstruksi Van Erp hanya menggunakan sekitar 40–45% material asli; bentuknya bersifat hipotesis dan tidak dipertahankan oleh Van Erp sendiri sebagai bentuk final.



- Candi-candi di sekitar Borobudur, termasuk yang lokasinya segaris yakni Mendut dan Pawon pun stupanya dak berchatra. Demikian pula berbagai candi lain seper Sewu, Sojiwan, Bubrah, Plaosan dan sebagainya.



- Sebanyak 1.537 stupa dalam kompleks Borobudur dak menunjukkan adanya chatra — keadaan ini bukan kehilangan, melainkan konsistensi antara stupa induk dan sekelilingnya.





Pakemnya adalah seluruhnya berchatra atau seluruhnya dak berchatra. Contoh yang seluruhnya berchatra dapat ditemukan di berbagai candi di Thailand, Myanmar, dan Laos.



- Penambahan chatra permanen berisiko melanggar Piagam Venesia 1964 dan prinsip keaslian Nara Document 1994.

LATAR BELAKANG DAN DINAMIKA WACANA

Perkembangan wacana mengenai chatra menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam cara isu ini dipahami. Narasi awal yang berkembang di ruang publik cenderung mengasumsikan chatra sebagai elemen yang hilang, sehingga memunculkan dorongan rekonstruksi. Namun, asumsi tersebut tidak memperoleh dukungan bukti arkeologis yang memadai, sehingga argumentasi bergeser menjadi pembenaran atas penambahan elemen baru.

Diskusi akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa polemik ini pada dasarnya merupakan konflik epistemik antara pendekatan ilmiah dan pendekatan simbolik (FIB UGM 2024). Dalam perspektif arkeologi, absennya chatra merupakan data historis yang harus dipertahankan, bukan kekurangan yang perlu dilengkapi.

Kajian kebijakan menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka pemerintah terdapat dualisme pendekatan: keaslian bentuk dan struktur chatra hasil rekonstruksi sebelumnya dipertanyakan, namun pada saat yang sama terdapat dorongan untuk pemasangan dengan



permbangan religius dan pariwisata (Badruzzaman 2023). Kebijakan yang sedang dibahas—termasuk di internal Kementerian Agama dan Balai Konservasi Borobudur—belum sepenuhnya berpijak pada landasan epistemik yang konsisten.

Komunitas Buddhis Indonesia sendiri dak memiliki satu suara yang bulat dalam isu ini. Sebagian kalangan menganggap pemasangan chatra sebagai pemenuhan aspek simbolik yang pengng; sebagian lain menilai Borobudur telah memiliki kesakralan dan makna yang utuh tanpa chatra. Perbedaan perspekf internal ini perlu diakui sebagai bagian dari kompleksitas isu, bukan disederhanakan sebagai dukungan penuh terhadap rekonstruksi.

LANDASAN ARKEOLOGIS DAN TEMUAN EMPIRIS

Secara arkeologis, dak ditemukan buk struktural yang menunjukkan bahwa stupa induk Borobudur pernah memiliki chatra. Tidak adanya sistem pengunci, fondasi tambahan, atau mekanisme konstruksi seper soket yas yang mendukung keberadaan elemen tersebut mengindikasikan bahwa struktur tersebut memang dirancang tanpa chatra.

Kajian ikonografi terhadap relief Borobudur menunjukkan bahwa representasi stupa tanpa chatra justru lebih dominan dibandingkan yang berchatra (Lee 2024). Jika mengacu pada relief yang ada di Borobudur, terlihat bahwa penggunaan chatra hanya pada jenis stupa yang digunakan sebagai persembahan dan penyimpanan relik—bukan pada stupa monumental yang menjadi pusat kompleks. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam tradisi Buddhis, chatra bukanlah elemen wajib dalam konstruksi stupa.

Prakk di berbagai negara Buddhis juga menunjukkan pola yang konsisten: jika stupa induk berchatra, maka stupa di sekelilingnya pun demikian—dan sebaliknya. Seluruh lebih dari 1.500 stupa dalam kompleks Borobudur dak menunjukkan adanya chatra. Dalam tradisi arsitektur stupa yang dirancang secara terencana, bentuk stupa induk umumnya menjadi acuan bagi stupa-stupa lainnya. Keadaan buk ini dak dapat dipahami sebagai kehilangan semata, melainkan sebagai indikasi bahwa elemen tersebut memang dak pernah menjadi bagian dari sistem arsitektur Borobudur.

Rekonstruksi Van Erp: Batas Hipotesis

Upaya rekonstruksi chatra oleh Theodoor van Erp pada awal abad ke-20 perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Van Erp dak menemukan struktur utuh chatra, melainkan hanya fragmen batu kecil yang bentuknya dak dapat dipaskan fungsinya secara definif. Berdasarkan fragmen-fragmen tersebut serta perbandingan dengan stupa di India, ia kemudian menyusun hipotesis rekonstruksi dalam bentuk chatra berngkat.

Rekonstruksi ini bersifat eksperimental: hanya memanfaatkan sekitar 40–45% material asli berupa fragmen dak utuh yang dak dapat dipaskan susunan strukturnya. Bentuk chatra yang dihasilkan merupakan interpretasi hipotes, bukan rekonstruksi berbasis buk arkeologis yang konklusif. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Van Erp sendiri dak



mempertahankan rekonstruksi tersebut sebagai bentuk final—menunjukkan adanya kesadaran atas keterbatasan bukk yang tersedia (Badruzzaman 2023).

Studi terhadap candi-candi sezaman di Jawa Tengah juga menunjukkan konsistensi bentuk arsitektur tanpa chatra, yang mengindikasikan adanya tradisi arsitektur lokal yang utuh (Soekmono 1983). Dengan demikian, gagasan mengenai keberadaan chatra pada Borobudur lebih tepat dipahami sebagai hipotesis historis yang dak terkonfirmasi, bukan sebagai fakta arkeologis.

Perbandingan Lintas Kawasan

Dalam kajian arsitektur Buddhis lintas kawasan, keberadaan elemen payung pada stupa di Myanmar, Thailand, dan Laos menunjukkan perkembangan simbolik yang beragam. Namun, elemen tersebut umumnya dak lagi berbasis sistem harmika—yas seper dalam arsitektur India klasik, melainkan merupakan adaptasi lokal yang berkembang dalam konteks sejarah yang berbeda. Dengan demikian, keberadaan chatra di kawasan tersebut dak dapat digunakan sebagai dasar rekonstruksi lintas konteks pada Borobudur.

ANALISIS KEBIJAKAN DAN RISIKO

Dalam perspekk kebijakan publik, penambahan chatra menghadirkan empat kategori risiko yang dak dapat diabaikan:

Kategori	Risiko	Deskripsi	Tingkat Risiko
Konservasi	Pelanggaran prinsip keaslian	rekonstruksi tanpa bukk memadai menggeser prakk konservasi menjadi interpretasi spekulaf	TINGGI
Struktural/ Teknis	Potensi kerusakan jangka panjang pada batuan asli akibat kelemahan material dan konstruksi	kerentanan terhadap gempa dan faktor alam (Badruzzaman 2023)	TINGGI
Sosial & Religius	Potensi perbedaan persepsi antara komunitas keagamaan, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah	Komunitas Buddhis sendiri dak memiliki pandangan tunggal	SEDANG
Preseden Kebijakan	Penerimaan rekonstruksi spekulaf	Rekonstruksi spekulaf berpotensi melemahkan standar konservasi nasional untuk situs warisan lainnya	TINGGI



Selain itu, dorongan pemasangan chatra juga dapat dipengaruhi oleh konstruksi simbolik yang tidak sepenuhnya berbasis data empiris (FIB UGM 2024). Dalam kebijakan publik, alasan simbolik yang tidak didukung konsensus komunitas yang bersangkutan tidak dapat menjadi basis keputusan terhadap situs Warisan Dunia.

KERANGKA KONSERVASI INTERNASIONAL

Prinsip konservasi internasional memberikan batasan yang jelas terhadap intervensi pada situs warisan budaya:

TIGA PILAR KONSERVASI INTERNASIONAL

- ▶ Piagam Venesia (ICOMOS 1964): Rekonstruksi harus dihenkan pada k di mana dugaan dimulai. Intervensi yang tidak didukung bukti arkeologis diklasifikasikan sebagai falsifikasi.
- ▶ Nara Document on Authenticity (UNESCO 1994): Keaslian merupakan prinsip utama pelestarian. Intervensi yang mengubah kondisi autentik suatu situs dapat merusak nilai outstanding universal value-nya.
- ▶ Operational Guidelines UNESCO (2023): Setiap intervensi terhadap situs Warisan Dunia wajib melalui Heritage Impact Assessment (HIA) yang komprehensif, multidisipliner, dan dikonsultasikan dengan UNESCO/ICOMOS sebelum dilaksanakan.

Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam mengevaluasi dampak fisik, kultural, dan sosial dari setiap intervensi (Badruzzaman 2023). Indonesia sebagai negara perafikasi Konvensi Warisan Dunia memiliki kewajiban hukum internasional untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini.

POSISI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan keseluruhan kajian, penambahan chatra permanen pada stupa induk Borobudur belum memiliki dasar arkeologis yang memadai dan berisiko terhadap integritas monumen. Berikut adalah rekomendasi yang dapat dieksekusi oleh pemangku kepentingan terkait:

REKOMENDASI 1 Moratorium Pemasangan Chatra Permanen

Tenggat: Segera — sebelum ada keputusan implementasi | Tunda seluruh rencana pemasangan chatra permanen hingga Heritage Impact Assessment independen selesai dilakukan dan hasilnya dipublikasikan.



REKOMENDASI 2 Penugasan Heritage Impact Assessment (HIA) Independen

Tenggat: 6 bulan sejak moratorium ditetapkan | Libatkan arkeolog, konservator, ahli agama Buddha, dan perwakilan masyarakat lokal. Hasil HIA harus dipublikasikan dan dapat diakses publik sebelum keputusan kebijakan diambil.

REKOMENDASI 3 Konsultasi Formal dengan UNESCO dan ICOMOS

Tenggat: Bersamaan dengan proses HIA | Nofikasi resmi kepada UNESCO World Heritage Committee sebagaimana diwajibkan oleh Operational Guidelines 2023 sebelum intervensi signifikan apa pun dilakukan.

REKOMENDASI 4 Fasilitasi Dialog Multistakeholder

Tenggat: 3 bulan pertama | Selenggarakan forum konsultasi yang melibatkan komunitas Buddhis Indonesia secara representatif, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah. Pastikan ada satu pihak yang memonopoli narasi.

REKOMENDASI 5 Akomodasi Kebutuhan Simbolik Melalui Pendekatan Non-Permanen

Tenggat: Dapat diimplementasikan segera sebagai langkah transisi | Gunakan chatra temporer (dapat dipasang dan dilepas) untuk keperluan ritual keagamaan, dan rekonstruksi digital untuk kepentingan edukasi dan wisata, tanpa mengganggu struktur asli monumen.

PENUTUP

Polemik chatra menunjukkan bahwa Borobudur tidak hanya merupakan objek arkeologi, tetapi juga ruang pertemuan antara sejarah, makna, dan kepentingan kontemporer. Namun dalam kerangka kebijakan publik, keputusan harus berpijak pada bukti dan prinsip konservasi, bukan pada asumsi atau kebutuhan simbolik semata.

Menjaga Borobudur berarti menjaga batas antara interpretasi dan intervensi. Jika batas tersebut dilampaui tanpa dasar yang kuat, yang dipertaruhkan bukan hanya keutuhan monumen, tetapi juga integritas pengetahuan dan kredibilitas kebijakan itu sendiri. Borobudur adalah warisan seluruh umat manusia—dan menjaganya adalah tanggung jawab yang melampaui satu generasi.

Disusun oleh Tim Peneliti Institut Nagajuna
Eko Nugroho R.
Eddy Setiawan



REFERENSI

Badruzzaman 2023, 'Pemasangan Chatra pada Stupa Induk Candi Borobudur', Policy Brief, Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, BRIN, Jakarta.

Fakultas Ilmu Budaya UGM 2024, 'Mengulas Kontroversi Rencana Pemasangan Chatra Borobudur melalui Diskusi Arkeologi', 12 September, dilihat 01 Mei 2026, <<https://fib.ugm.ac.id/2024/09/mengulas-kontroversi-rencana-pemasangan-chatraborobudur-melalui-diskusi-arkeologi.html>>.

ICOMOS 1964, The Venice Charter for the Conservaon and Restoraon of Monuments and Sites, ICOMOS, Paris, tersedia di <https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/venice_e.pdf>.

Lee, S 2024, 'Sekali Lagi tentang Chatra', makalah dipresentasikan pada Diskusi Peringatan Hari Purbakala ke-111, Perhimpunan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat Daerah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bugisan, Prambanan, 13 Juni 2024.

Shinta LEE, ST 2025, Preserving the Integrity of Borobudur: Defining the 8th-9th Century CE Nusantara Stupa Vernacular, SPAFA Journal, Vol. 9, pp. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.26721/SPAFAJOURNAL.BO2FRUEQ93>.

Soekmono, R 1983, Pelita Borobudur Seri A No. 6, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

UNESCO 1994, The Nara Document on Authencity, UNESCO, Paris.

UNESCO 2023, Operaonal Guidelines for the Implementaon of the World Heritage Convenon, UNESCO World Heritage Centre, Paris.

Tentang Instut Nagajuna

Institut Nagajuna adalah lembaga pengkajian dan pengembangan komunitas Buddhis Indonesia. Policy Brief ini dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti.